

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada Bab II, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai praktik penahanan ijazah belum diatur dalam hukum ketenagakerjaan, Pengaturan mengenai praktik penahanan ijazah hanya diatur dalam SE Menaker Nomor M/5/HK.04.00/V/2025. SE Menaker ini statusnya tidak dapat mengikat dan memberikan sanksi bagi perusahaan, karena karakteristiknya sebagai surat edaran bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Pembuatan klausula penahanan ijazah bertentangan dengan Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2023 dan tidak memenuhi empat syarat sah nya perjanjian kerja karena terdapat cacat kehendak serta tidak memenuhi klausula tidak halal.
2. SE Menaker Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 bukan bentuk peraturan perundang-undangan sehingga konsekuensinya tidak bisa mengikat dan memberikan sanksi bagi perusahaan. Di Kota Surakarta kehadiran SE Menaker ini tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam penegakan hukum terkait penahanan ijazah, karena di Kota Surakarta telah diberlakukan Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur larangan penahanan ijazah dan telah disahkan lebih dahulu dibanding SE Menaker Nomor M/5/HK.04.00/V/2025. Keberadaan SE Menaker ini

memiliki pengaruh kepada pekerja untuk lebih melek hukum terkait penahanan ijazah yang dilakukan perusahaan.

B. Saran

1. Untuk pemerintah, diperlukan pembaruan dalam UU Ketenagakerjaan ataupun peraturan pelaksanaannya mengenai pengaturan larangan penahanan ijazah oleh perusahaan. SE Menaker Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 yang telah berlaku masih kurang maksimal untuk digunakan sebagai dasar hukum dalam mengatur dan memberikan sanksi bagi perusahaan yang melanggar.
2. Untuk Disnaker, sebagai lembaga yang mengawasi dan menangani penyelesaian sengketa dalam hubungan kerja perlu ditingkatkan lagi dalam penegakan hukumnya terutama mengenai permasalahan penahanan ijazah.
3. Untuk perusahaan, diharapkan tidak membuat perjanjian kerja yang memuat klausula penahanan ijazah terkhususnya perusahaan di Kota Surakarta. Jika ingin mencegah pekerja *resign* sebelum kontrak kerja berakhir dapat mencantumkan denda yang harus dibayar oleh pekerja apabila *resign* sebelum kontrak kerja berakhir.
4. Untuk pekerja, perlu mencermati segala ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja terutama hak dan kewajiban yang dimiliki pekerja. Pekerja juga perlu mengetahui hal apa yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Sulaiman dan Andi Walli, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan*, Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta.
- Asri Wijayanti, 2009 *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lulu Tri Harinie, dkk, 2024, *Hubungan Industrial*, Inves Media, Bali.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Nindry Sulistya Widiastiani, 2022, *Pengantar Hukum Perburuhan Pasca Undang-Undang Hak Cipta*, Kanisius, Yogyakarta.
- Riawan Tjandra. W, 2023, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Filosofi, Teori, Dan Praktek Karya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Salim, H.S, 2019, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti R. dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Sudikno Mertokusumo, 2022, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.
- Wiwik Sri Widiarty, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta.

Jurnal

- Davin, A.A dan R. Rasji, 2024, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) yang Tidak Mendapatkan Upah”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol.4 No.4, Dinasti Review, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2159>.
- Deny Setiyo Utomo. 2025, “Kedudukan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Tentang Larangan Penahanan Ijazah Dalam Hukum Positif Indonesia” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol.15 No.2, Jurnal Supremasi, <https://doi.org/10.35457/pfm3zs25>.
- Dicky Satria Pratama, dkk, 2024, “Analisis Hukum Mengenai Penahanan Ijazah

Karyawan Oleh Perusahaan”, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1.No. 4, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2628>.

I Wayan Agus Vijayantera, 2017, “Penahanan Ijazah Asli Pekerja Dalam Hubungan Kerja Sebagai Bagian Kebebasan Berkontrak”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 3 No. 2, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, <https://doi.org/10.23887/jkh.v3i2.11823>.

Mohd. Yusuf DM, dkk, 2025, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Dalam Bukunya Wirhanuddin.” *JIHHP : Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, Vol.5, No. 4. Dinasti Review, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4234>.

Nijam Hiliwilo dan Weny A. Dunga, 2025, “Akibat Hukum Praktek Penahanan Ijazah Pekerja Yang Dilakukan Oleh Pemberi Kerja”, *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol.6 Issue 2, <https://doi.org/10.55357/is.v6i2.938>.

Sharon Clarins, 2022, “Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Dalam Putusan Pengadilan Indonesia”, *Dharmasiswa*, Vol. 2 Article 1 Jurnal Program Magister Hukum FHUI, <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss2/1>.

Wafa Yusdheaputra, 2023 “Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurist-Diction*, Vol.6, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/43557>

Karya Ilmiah

A Ayu Pramitha Hartoputri, 2025, *Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Di Gereja Katolik Santo Terus Dan Paulus Minormatani Yogyakarta*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Cindy Lestary, 2024, *Efektivitas Elektronik Tilang (E-Tilang) Dalam Hukum Polda Bengkulu Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Siyasa Dusturiyah*, Skripsi, Program Sarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Devi Sukaesi, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Penahanan Ijazah Oleh Perusahaan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Lancang Kuning.

Kunde Tapy Gani, 2020, *Efektivitas Pasal 79 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan*

Dalam Hal Penahanan Ijazah Pekerja Oleh Perusahaan (Studi Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur), Skripsi, Program Sarjana Universitas Brawijaya Malang.

Sukinem, 2016, Tanggung Jawab PT Gemilang Unggas Prima Dalam Pelaksanaan Kemitraan Dengan Pengusaha Ternak Ayam Broiler Kabupaten Indragiri Hulu, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Winda Rahayu, 2022, *Analisis Masalah Terhadap Jaminan Ijazah Dalam Sistem Kontrak Kerja (Studi Kasus Di PT. Mega Colombus Parepare)*, Skripsi, Program Sarjana Insitut Negeri Islam Pare-Pare.

Website

Antonius Christian, Kasus Penahanan Ijazah Karyawan Di Solo, Perempuan Asal Sukoharjo Tempuh Jalur Hukum, Temannya Takut Resign Karena Faktor Ini <https://radarsolo.jawapos.com/solo/846057859/kasus-penahanan-ijazah-karyawan-di-solo-perempuan-asal-sukoharjo-tempuh-jalur-hukum-temannya-takut-resign-karena-faktor-ini> diakses 24 September 2025.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, Pengertian Praktik <https://kbbi.web.id/praktik> diakses pada 28 September 2025.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, Pengertian Tahan <https://kbbi.web.id/tahan> diakses 28 September 2025.

Disnakertrans Jawa Timur, Beri Solusi Konkret Kasus Penahanan Ijazah Gubernur Khofifah: PEMPROV JATIM Siap Urus Penerbitan Ulang Ijazah Pekerja Yang Ditahan: Tak Hentikan Proses Hukum Pada APH - Disnakertrans Jawa Timur <https://disnakertrans.jatimprov.go.id/berita/573/beri-solusi-konkret-kasus-penahanan-ijazah-gubernur-khofifah-pemprov-jatim-siap-urus-penerbitan-ulang-ijazah-pekerja-yang-ditahan-tak-hentikan-proses-hukum-pada-aph> diakses 6 Oktober 2025

Hukum Online, Peraturan Daerah: Fungsi, Muatan, dan Aspek Pentingnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-peraturan-daerah-lt62a6fc176a0f9/?page=all>, diakses tanggal 18 Januari 2026.

Kemdikbud, *Analisis Normatif Terhadap Status Surat Edaran Dalam Larangan Penahanan Ijazah UAD Gelar Webinar Nasional*, <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/analisis-normatif-terhadap-status-surat-edaran-dalam-larangan-penahanan-ijazah-uad-gelar-webinar-nasional>, diakses tanggal 12 November 2025.

Michael Hans, Apakah Perusahaan Boleh Menahan Ijazah Pekerja?, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ijazah-ditahan-perusahaan-lt603df84f452f1/>, diakses 28 September 2025.

Rafan Darodjat, Penahanan Ijazah: Mencari Equilibrium Antara Hak Fundamental Pekerja Dan Strategi Perusahaan <https://www.hukumonline.com/berita/a/penahanan-ijazah--mencari-equilibrium-antara-hak-fundamental-pekerja-dan-strategi-perusahaan-lt68107f4538049/> diakses 6 Oktober 2025

Renata Christha Auli, Asas-Asas Dalam Pasal 1338 KUH Perdata <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata-lt657e2d46785c/> diakses 12 November 2025

Renie Aryandani, Bolehkah Instansi Pendidikan Menahan Ijazah Dan Akta Lahir? <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-instansi-pendidikan-menahan-ijazah-dan-akta-lahir-lt65ba445b64499/>. diakses 12 November 2025

Rio Christiawan, Penyalahgunaan Keadaan Dalam Hukum Perjanjian <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyalahgunaan-keadaan-dalam-hukum-perjanjian-lt678e813731c32/?page=all> diakses 22 November 2025

Tempo.Co, Wali Kota Solo Terima 26 Aduan Penahanan Ijazah Karyawan, Langsung Disidak, <https://www.tempo.co/ekonomi/wali-kota-solo-terima-26-aduan-penahanan-ijazah-karyawan-langsung-disidak-1434075>, diakses 24 September 2025.

Unairnews, Pakar Hukum UNAIR Soroti Praktik Penahanan Ijazah Oleh Pengusaha, <https://unair.ac.id/pakar-hukum-unair-soroti-praktik-penahanan-ijazah-oleh-pengusaha/> diakses 28 September 2025.

Willa Wahyuni, Akta Autentik Dan Akta Di Bawah Tangan, <https://www.hukumonline.com/berita/a/akta-autentik-dan-akta-di-bawah-tangan-lt63a2eaabaf2db/> diakses 18 tanggal Januari 2026.

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Alfian Anggoro selaku perwakilan dari Disnaker Bidang Hubungan Industrial di Disnaker Kota Surakarta hari Selasa, 28 Oktober 2025, pukul 13.40 WIB.

Hasil wawancara dengan narasumber Ibu Dr. Rosita Chandrakirana, S.H., M.H. selaku Akademisi Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Sebelas Maret di Universitas Sebelas Maret hari Jumat, 31 Oktober 2025, pukul 09.30 WIB

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 1. Sekretariat Daerah Kota Surakarta. Surakarta.

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah Dan/Atau Dokumen Milik Pribadi/Pekerja Oleh Pemberi Kerja.

LAMPIRAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 81/V/CVD-FH

21 Oktober 2025

Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

Kepada

Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta
Jalan Slamet Riyadi No.306, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta City,
Jawa Tengah 57141

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara terkait dengan bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Joanne Adventina Kunti Adhyaksa
2. Nomor Mahasiswa : 220514869
3. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis
4. Lokasi Riset : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta
5. Dosen Pembimbing I : Nindry Sulistya Widiastiani, SH., MH.
- Dosen Pembimbing II : -
6. Judul Skripsi : Praktik Penahanan Ijazah Oleh Perusahaan Sebagai Jaminan Kerja (Studi Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta)
7. No. Handphone / WA : 085640262367

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat

Kampus I Gedung Alfonsus
Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL

<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id



Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Disnaker Kota Surakarta



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 121/V/CVD-FH
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

27 Oktober 2025

Kepada

Yth. Dr. Rosita Chandrakirana, S.H., M.H.

Jl. Ir. Sutami No.36A Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara terkait dengan bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Joanne Adventina Kunti Adhyaksa
2. Nomor Mahasiswa : 220514869
3. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis
4. Lokasi Riset : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
5. Dosen Pembimbing I : Nindry Sulistya Widiastiani, SH., MH.
5. Dosen Pembimbing II : -
6. Judul Skripsi : PRAKTIK PENAHANAN IJAZAH OLEH PERUSAHAAN SEBAGAI JAMINAN KERJA (STUDI KASUS DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SURAKARTA)
7. No. Handphone / WA : 085640262367

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.


Wati Supriyanto I,

FAKULTAS
Dr. Wati Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat

Kampus I Gedung Alfonsus
Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL

<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-561031
Fax. : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id



Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Dosen Dr. Rosita Chandrakirana, S.H.,
M.H.



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS TENAGA KERJA**

Jalan Brigjend Slamet Riyadi No. 306 Telepon (0271) 714800 - 719825 Fax (0271) 719825
E-mail : disnakersurakarta@gmail.com, disnaker@surakarta.go.id
SURAKARTA
(57141)

SURAT KETERANGAN

Nomor : B/800.1.01.1/ 3753

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : JOANNE ADVENTINA KUNTI ADHYAKSA
NIM : 220514869
Fakultas : Hukum
Mahasiswi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Telah melakukan penelitian untuk menyusun skripsi dengan judul :

"Praktik Penahanan Ijazah oleh Perusahaan sebagai Jaminan Kerja (Studi Kasus di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta)".

Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2025.

Demikian Surat Keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 31 Oktober 2025

Kasubag Administrasi,
Kepegawaian dan Organisasi



HURMALI SAPTAJI, S.Psi
NIP. 19710705 199803 1 012



Lampiran 4 Foto dengan Dr. Rosita Chandrakirana, S.H., M.H.



Lampiran 5 Foto dengan Bapak Alfian Anggoro, S.H Perwakilan dari Disnaker
Kota Surakarta